



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 09 Januari 2021

Halaman: 1

JANGAN BERLINDUNG DI BALIK PANDEMI Pemkot Didorong Munculkan Inovasi untuk PAD

YOGYA (KR) - Sektor pariwisata sejauh ini masih menjadi salah satu unggulan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogya. Meski demikian, Pemkot Yogya didorong mampu memunculkan inovasi untuk menjaga stabilitas PAD di tengah masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, menilai sebagian besar inovasi yang diluncurkan Pemkot Yogya berhubungan langsung dengan layanan publik. "Sebaliknya, inovasi yang bersifat internal dalam upaya meningkatkan PAD masih belum terbangun. Adanya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menjadi momentum inovasi PAD," katanya, Jumat (8/1).

Tidak dapat dipungkiri, kondisi pandemi menjadi pukulan berat bagi in-

dustri pariwisata. Kota Yogya yang tidak memiliki sumber daya alam dan sangat bergantung pada sektor jasa pun sangat terdampak. Pajak hotel dan restoran yang setiap tahun cukup diandalkan, kini harus ada rasionalisasi.

Meski demikian, Rifki berharap OPD yang bersinggungan dengan PAD tidak berlindung dibalik kondisi pandemi. Justru kini harus terbiasa melakukan inovasi-inovasi kegiatan agar target potensi PAD bisa selalu dicapai. "Pada tahun anggaran 2020 realisasi PAD memang bisa melampaui target. Sepuluh jenis pajak daerah sampai akhir tahun lalu di atas 100 persen. Tetapi target itu hasil rasionalisasi dan jauh di bawah potensi," imbuhnya.

Oleh karena itu, perlu ada upaya optimalisasi pendapatan untuk mengganti pajak hotel dan restoran yang

mengalami penurunan secara signifikan. Optimalisasi yang dimaksud bukan berarti menaikkan nilai pajak di sektor lain karena bisa menambah beban masyarakat. Akan tetapi bisa dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak daerah. "Keringanan pajak harus tetap diberikan, terutama bagi wajib pajak yang selama ini taat aturan. Tetapi jika ada celah kebocoran pajak daerah, itu harus dikejar," tandasnya.

Begitu pula dari aspek regulasi. Sistem pajak berbasis elektronik atau e-tax perlu digarap lebih serius. Hal ini agar celah kebocoran pajak bisa semakin ditekan serta target pajak selaras dengan potensi. Pasalnya, semakin tinggi pendapatan daerah dari sektor pajak maka imbasnya ke masyarakat juga akan semakin besar. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P 2. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005